

Pengaruh Konflik Natuna terhadap Kondisi Ekonomi dan Keamanan Indonesia

Moh. Fathoni Hakim

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: fathoni_hakim@uinsby.ac.id

Alma Puri Adriani

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: almapuriadriani1999@gmail.com

Ryan Eko Pramono

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: epramono242@gmail.com

Annisa Astri Amaliya

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: annisaastri5@gmail.com

Thoriqul Rizky Hidayatullah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: nakrot060497@gmail.com

Adiyat Abdullah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: micfriboy27@gmail.com

Abstract

This paper examines how the still-tense state of Natuna conflict between China and Indonesia will be a significant influence on the economic conditions and security of the two countries' sea territories. Both of these factors can be important aspects because they are directly related to the state. The influence that occurs on these economic conditions includes the condition of income or the acquisition of catches of local fishermen who declined than usual. While the influence on the security aspect concerns the safety conditions of Natuna fishermen, due to intimidation by foreign vessels against local Natuna fishermen. The difference in territorial claims between Indonesia and China made the two sides blame each other, from the Chinese side who claimed that Natuna was included in their own Nine-dash Line region based on history. Meanwhile, Indonesia

claims Natuna based on the United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982. It was stated in it that Indonesia has the right to EEZ the right to use natural resources to the bottom of the sea, especially if there is oil and gas content. This article uses the theory of conflict prevention and researchers use quantitative methods where data processing in the form of numbers and graphs to find the level of economy and security. Researchers suspect that due to the Natuna conflict, Indonesia's economic condition has fallen and there has been an increase in security in Indonesia especially in the Natuna region.

Tulisan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana keadaan pasca konflik natuna yang masih menegang antara China dan Indonesia mempengaruhi kondisi perekonomian dan keamanan Indonesia. Penulis menggunakan teori conflict prevention dan peneliti menggunakan metode kuantitatif dimana pengolahan data berupa angka dan grafik untuk menemukan tingkat ekonomi dan keamanan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat perubahan ekonomi dan keamanan yang dialami Indonesia setelah konflik natuna terjadi, bagaimana penyelesaian masalah dilakukan, dan bagaimana kondisi stabil dapat tetap dipertahankan. Kedua faktor ini menjadi aspek penting karena bersangkutan langsung dengan kestabilan negara. Secara keseluruhan, dapat diketahui nantinya apa saja usaha-usaha Indonesia dalam merespon, mengatasi dan mempertahankan kondisi wilayah Natuna agar tetap stabil baik dalam sektor ekonomi maupun keamanan.

Keywords: Conflict Prevention, Ekonomi, Keamanan, Natuna

Pendahuluan

Perkembangan Laut Cina Selatan menjadi sebuah fokus baru dan penting di tahun 2019. ASEAN serta China saat ini tengah gencar-gencarnya memberikan garis batas masing-masing pada wilayah tersebut. Tidak berhenti pada Laut Cina Selatan namun muncul kembali sebuah persengketaan mengenai wilayah laut Natuna yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Aksi saling klaim dan merasa memiliki hal atas Natuna terus terjadi antara Indonesia dan juga China. Natuna menjadi pembahasan penting karena hingga saat ini belum dimunculkan keputusan resmi atas hak kepemilikannya.

Kajian ini memiliki tujuan : (1) Memaparkan bagaimana latar belakang yang menjadi alasan konflik Natuna dapat terjadi (2) Menjelaskan dan menganalisis dampak dalam bidang ekonomi yang dialami oleh Indonesia dengan adanya konflik dan sengketa wilayah perairan Natuna (3) Menjelaskan dan menganalisis dampak dalam bidang keamanan yang dialami oleh Indonesia dengan Adanya konflik dan sengketa wilayah perairan Natuna.

Konflik ini bermula karena adanya perbedaan cara pandang terhadap suatu batas wilayah yang mengakibatkan timbulnya masalah tertentu. Jika dilihat dari sisi China, mereka membenarkan tindakannya di perairan Natuna karena didasarkan pada klaim historis China mengenai Nine Dash-Line. Nine Dash-Line ini adalah garis yang terdapat di peta sejarah pemerintah China yang pertama kali muncul pada tahun 1947 atau setelah Perang Dunia II selesai. Garis

ini digunakan pihak China sebagai pedoman atas hak untuk beraktivitas serta penangkapan ikan para nelayan China di perairan tersebut (traditional fishing ground)¹. Dari sisi Indonesia dengan tegas menolak pernyataan China atas klaim historis tersebut, karena Indonesia berpegang pada apa yang telah ditetapkan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, artinya Indonesia lebih berhak atas kepemilikan perairan Natuna.

Adanya kapal nelayan China yang masuk ke wilayah perairan natuna dan melakukan kegiatan penangkapan ilegal disana. Dalam kasus ini China memberikan respon dengan cara berusaha kembali lagi mngusahakan hubungan bilateral yang kembali membaik. Alasan utama China adalah karena Indonesia adalah negara yang berpengaruh besar di ASEAN yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan perekonomian mereka. Hubungan yang tidak baik dianggap sebagai sebuah penghalang apabila secara terus menerus terjadi. China mengharapkan adanya usaha diplomatik dari Indonesia sebagai negara bersangkutan untuk saling menyelesaikan secara baik-baik². Dengan adanya respon China, Indonesia turut memberikan respon dalam menyikapi konflik yang telah terjadi di perairan natuna. Respon ini berupa diluncurkannya armada angkatan laut sebagai upaya resolusi konflik menghadapi permasalahan dengan negara China. Upaya penyelesaian melalui Naval Dipolamcy ini meliputi berbagai tahap diantaranya kehadiran, membangun citra baik, membangun kerjasama dan koreksi³.

Konflik ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor ekonomi dan keamanan Indonesia, itulah mengapa kedua sektor ini dirasa cukup penting untuk menjadi fokus kajian. Dalam sektor ekonomi, perebutan batas wilayah ini kemungkinan dapat mengganggu Indonesia mendapatkan Investasi dari penanaman modal asing. Karena itu, upaya pemerintah dalam menjaga hubungan bilateral yang baik antara China – Indonesia juga harus mempertimbangkan faktor ini. Karena tidak bisa dipungkiri, China merupakan salah satu rekan kerja sama Indonesia yang juga berinvestasi di Indonesia⁴.

Dalam sektor keamanan, dampak yang dapat ditimbulkan dari kejadian ini, terlihat memang tidak terlalu besar. Dikatakan oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia, pihak dari Pemerintahan RI juga belum melakukan tindakan dalam mengatasi masalah seperti ini, karena bagaimanapun China merupakan negara sahabat. Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari Dampak dalam segi keamanan, Indonesia menjadi lebih tegas dalam melindungi kepentingan regionalnya. Pengadaan latihan angkatan laut Indonesia dan AS di sekitar pulau Batam serta rencana pembangunan lebih banyak pos militer dan benteng militer di daerah perbatasan khususnya di Natuna membuktikan keseriusan Indonesia menghadapi ancaman klaim China. Pemanfaatan media massa juga dilibatkan oleh pemerintah RI dalam membahas keamanan nasional secara signifikan.

Conflict Prevention

Conflict Prevention sendiri adalah istilah luas yang mengacu pada berbagai kegiatan dan strategi dalam bidang pembangunan perdamaian yang digunakan untuk mencegah dan kemudian menetralkan pemicu potensial untuk konflik kekerasan yang meluas⁵. Dalam artikel ini untuk membahas mengenai pengaruh konflik Natuna terhadap kondisi ekonomi dan keamanan Indonesia, peneliti menggunakan teori konflik prevention. Konflik Prevention adalah sarana untuk mengakhiri situasi yang mungkin nantinya menjadi berbahaya, menimbulkan kekerasan, pencegahan konflik ini juga untuk menghindari kekerasan yang kan timbul secara turun temurun. Dalam kasus yang terjadi antara Indonesia dengan China, konflik prevention muncul saat bagaimana respon China meluncurkan armada angkatan lautnya untuk upaya Naval Diplomacy yang meliputi berbagai tahap diantaranya kehadiran, membangun citra baik, membangun kerjasama serta koreksi.

Secara operasional, sebagian besar diplomasi preventif dapat ditempatkan dalam dua kategori besar:

- Pencegahan langsung / operasional - Intervensi reaktif dan sering jangka pendek diambil untuk mencegah pecahnya kekerasan, yaitu penggunaan mediator.
- Pencegahan struktural - Perubahan kelembagaan atau akar rumput jangka panjang yang dirancang untuk membantu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, sembari mengatasi penyebab mendasar dari kekerasan dalam suatu komunitas, yaitu bantuan pembangunan.

Penerapan pencegahan konflik yang dilakukan pada kasus yang terjadi antara Indonesia dengan China yang berkaitan dengan wilayah perairan natuna yaitu pencegahan dilakukan secara langsung dimana Indonesia yang memberikan usulan pada China dengan meluncurkan armada angkatan lautnya untuk upaya Naval Diplomacy dimana adanya usaha-usaha diplomasi yang dilakukan negara yang berkonflik melalui kekuatan militer kelautan yang meliputi berbagai tahap diantaranya kehadiran, membangun citra baik, membangun kerjasama serta koreksi⁶.

Metode Penelitian

Dalam artikel ini peneliti akan menggunakan metode kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui⁷. Metode kuantitatif ini nantinya akan digunakan peneliti untuk menemukan tingkat ekonomi dan keamanan dengan pengolahan data berupa angka dan grafik

Letak Geografis dan Sumber Daya Alam Natuna

Perairan Natuna telah menjadi titik terluar utara Republik Indonesia dalam segi geografi perairan Natuna terletak di antara Semenanjung Malaysia di sebelah barat dan Kalimantan (Kalimantan) di sebelah timur. Mereka juga terletak beberapa ratus kilometer timur laut Singapura dan berada di bawah ujung selatan Vietnam⁸. Natuna terletak tepat di utara Selat Karimata yang tidak hanya membelah pulau Sumatra dan Kalimantan. Di dalam atlas Indonesia khususnya, perairan di dalam dan sekitar Natuna, terutama yang berada di ujung utara Natuna, digambarkan sebagai "Laut Natuna" untuk menegaskan dengan tegas kedaulatan Indonesia atas Natuna. "Laut Natuna", sendiri tidak tampil di atlas dunia meskipun telah ada upaya untuk mendapatkan "Laut Natuna" disetujui oleh PBB sehingga nama tersebut dilegitimasi dan kemudian tercermin dalam peta internasional⁹.

Selain letak yang strategis, Kepulauan Natuna terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, antara lain sumber daya minyak dan gas. Lapangan gas Natuna D-Alpha yang terletak 225 km utara Pulau Natuna (di dalam IEEZ Indonesia) dikatakan mampu memasok kebutuhan gas alam di Indonesia selama 70 tahun¹⁰. Natuna juga memiliki potensi sumber daya perikanan mulai dari ikan pelagis kecil, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi¹¹. Namun, selain sumber daya alam yang melimpah Kepulauan Natuna juga menyimpan peninggalan budaya yang sangat tinggi nilai sejarahnya, baik yang terpendam di dalam tanah maupun yang berada di dalam laut¹².

Latar belakang konflik perairan Natuna yang berbatasan dengan wilayah Laut Cina Selatan

Laut China Selatan yang berbatasan dengan Natuna menjadi jalur laut yang vital untuk pertukaran di antara semua daratan. Posisi geografis dan strategis Laut China Selatan menciptakan dilema keamanan untuk hampir semua kekuatan di Asia Timur dan wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas. Kepemilikan wilayah tersebut diperdebatkan, dengan klaim yang tumpang tindih oleh Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Brunei¹³. Kepulauan Spratly diklaim oleh Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, sementara Paracels telah dikendalikan oleh Cina sejak 1974 dan diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Sengketa maritime ini dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, strategis dan politik masing-masing negara.

Klaim Cina di Laut China Selatan patut mendapat perhatian khusus, Cina mengklaim bahwa ia memiliki kedaulatan yang tidak dapat disangkal atas pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan perairan yang berdekatan. Selain itu juga

China mengklaim memiliki hak atas perairan yang relevan serta dasar laut dan lapisan bawah tanahnya. Ini diungkapkan China dalam bentuk Nine Dash-Line yang berbentuk-U yang mencakup 77 bagian utama Laut Cina Selatan di wilayah tersebut, mulai dari daerah selatan ke timur garis pantai Vietnam, berbelok ke timur ke timur laut Kepulauan Natuna yang dikontrol Indonesia, dan ke utara negara bagian Sarawak Malaysia, kemudian berbelok ke utara-timur di sepanjang pantai Brunei Darussalam dan negara Malaysia Sabah, dan akhirnya ke utara ke barat Filipina.

Klaim China terhadap kepemilikan perairan Natuna

Terbitnya peta resmi yang disebut dengan peta *Nine Dash-Line*. Yang awalnya Indonesia merupakan *Non-Claimant State*, pada akhirnya juga harus ikut terkena potensi konflik karena China juga menyatakan bahwa perairan di kepulauan Natuna yang termasuk dalam ZEE Indonesia adalah Traditional Fishing Ground milik China sejak ribuan tahun yang lalu. Sehingga China menganggap wajar jika para nelayan tradisionalnya mencari dan menangkap ikan hingga perairan Natuna. Bahkan China sendiri tidak mengakui nama laut Natuna, China bersikeras menganggap nama wilayah perairan tersebut adalah Laut Cina Selatan, meskipun perubahan Laut Cina Selatan di wilayah Natuna menjadi Laut Natuna pernah dilakukan dan diresmikan oleh pihak Indonesia pada tahun 2017. Namun, Indonesia sendiri tidak pernah mengakui Nine Dash-Line yang disebutkan China tersebut, karena klaim China ini dianggap tidak memiliki dasar hukum yang benar-benar diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Penurunan Hasil Sumber Daya Alam

Ekonomi menjadi roda kehidupan setiap negara, dengan adanya ekonomi dapat mensejahterakan rakyat-rakyat, dengan lancarnya perekonomian maka negara-negara tersebut akan bisa menjadi negara dengan menciptakan inovasi untuk melangkah kedepan dan dapat bisa bersaing dengan negara tetangga atau yang berada disekitar dan seluruh negara yang ada di dunia. Jika ekonomi tidak terbentuk, maka negara-negara tidak akan berjalan sepenuhnya atau tidak akan berjalan sempurna dikarenakan ekonomi merupakan suatu yang dapat menjalankan negara. Jika perekonomian terganggu maka akan mengganggu kestabilan negara satu dengan negara yang lain, negara-negara tersebut akan mengalami kerugian masing-masing akibat dari adanya konflik atau konflik diantara dua negara. Seperti halnya yang terjadi kepada Indonesia dengan adanya sengketa dengan China ini.

Di dalam pulau Natuna memiliki banyak sumber daya alam seperti perikanan yang banyak dan langkah, lalu cadangan minyak dan gas dan

diperkirakan cadangan gas yang ada dalam natuna utara tersebut terbesar ke dua setelah arab Saudi, sehingga menjadi perebutan dan terjadi sengketa. Adanya sumber daya tersebut berdampak pada aspek ekonomi kedua negara salah satunya bagi Indonesia. Perekonomian akan terhambat seiring berjalannya sengketa yang terjadi, tidak hanya negara yang bersengketa tetapi berdampak juga pada negara-negara tetangga atau negara yang berada pada sekitaran laut china selatan atau natuna utara tersebut, seperti Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia.

Laut Natuna juga menjadi tempat sebagian besar lalu lintas barang-barang maritim berlangsung, wilayah tersebut akan penting bagi keamanan kewilayahan dan makmurnya ekonomi negara-negara yang berada disekitar maupun negara yang melalui natuna tersebut. Selain hasil laut, wilayah itu juga menyimpan cadangan gas alam yang berguna dan dapat dimanfaatkan sumbernya bagi Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung apabila Indonesia tidak memenangkan sengketa ini dengan China maka nantinya Indonesia bukan hanya rugi soal cadangan migas saja tapi juga terhadap potensi laut, potensi perikanan, hasil laut dan hasil lainnya¹⁴.

Penurunan kegiatan ekspor dan impor antara Indonesia dengan China

Perkembangan perekonomian negara di dunia kini tidak dapat terpisah dari bagaimana kondisi perekonomian global. Relasi antar negara dalam menjalin hubungan diantaranya menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan perekonomian masing-masing negara¹⁵. Hal tersebut bukanlah pengecualian antara Indonesia dengan China; terjadinya klaim sepihak pulau Natuna oleh China membuat kegiatan ekspor impor antara Indonesia dengan China mengalami penurunan signifikan terutama ditahun 2019 yang menjadi gencar-gencarnya perebutan wilayah kepulauan Natuna. Badan Pusat Statistik (BPS) didalam wawancara memaparkan bahwa secara kumulatif data ekspor dan impor telah mengalami penurunan selama 2019 bilamana dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suhariyanto, kepala BPS, menjelaskan nilai ekspor Indonesia telah menurun 6,9 persen dibandingkan tahun 2018 sedangkan nilai impor baik barang konsumsi, bahan baku maupun barang modal mengalami penurunan masing-masing 4,51 persen, 11,07 persen dan 5,13 persen¹⁶.



** Per September 2019
Sumber : BPS (2019), diolah SUHANA

*Sumber data dari BPS (2019) yang diolah oleh Suhana

Data diatas merupakan volume perdagangan ikan Indonesia dengan berbagai negara didunai, salah satunya China. Dari data tersebut dapat kita amati bahwa ekspor Indonesia terhadap China mengalami penurunan dengan selisih 145,94 ribu ton diantara tahun 2018 dan 2019 dan penurunan impor dengan selisih 26,39 ribu ton diantara kedua tahun tersebut. Adanya penurunan kuantitas ekspor tersebut tidak terlepas dari konflik laut cina selatan yang tengah terjadi dalam cangkupan tahun tersebut. Berbagai kasus pencurian ikan yang dilakukan China menjadi salah satu faktor penghambat menurunnya ekspor perikanan Indonesia¹⁷.

Tindakan kewanman melalui latihan kewanman kelautan

Permasalahan mengenai wilayah perairan natuna ini direspon begitu serius oleh Indonesia. Hal demikian dapat terlihat dari bagaimana cepatnya respon Mentri Luar Negeri Indonesia ibu Retno Marsudi dalam usahanya memanggil perwakilan Tiongkok untuk datang ke Indonesia dan membahas permasalahan konflik ini khususnya setelah kejadian tuduhan mengenai tindak pencurian hasil sumberdaya alam yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok dan tidak adanya ancaman serta intervensi penjaga garis pantai Tiongkok yang akan membawa kasus ini ke International Tribune. Tidakan Retno Marsudi di ikuti juga dengan keinginan yang serupa yaitu oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang berharap duta besar Tiongkok datang dan membahas permasalahan ini¹⁸.

Parlemen Indonesia bahkan telah mampu menggelontorkan anggaran untuk mengembangkan fasilitas militer di wilayah Natuna bila diperlukan. Angkatan Laut juga ikut serta menyatakan kesanggupannya bahwa mereka telah memperkuat kekuatan di sana. Telah dicatat bahwa pihak angkatan laut dan keamanan lainnya berniat mengubah Natuna menjadi seperti layaknya "Pearl Harbor"¹⁹.

kekuatan angkatan laut sebagai salah satu bentuk upaya diplomasi atau yang biasa di sebut Naval Diplomacy²⁰. Melalui usaha diplomasi ini usaha yang

mampu dilakukan adalah merespon konflik teritorial dan wilayah yang kemudian melalui beberapa tindakan seperti diplomasi damai, menunjukkan kekuatan militer yang dimiliki, ataupun kombinasi keduanya²¹. Cara ini muncul dikarenakan tuntutan yang mengikuti Indonesia yaitu wilayah maritim yang begitu luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sehingga secara tidak langsung wilayah laut menjadi tuntutan agar Indonesia mampu menyesuaikan segala konsep pertahanan, kebijakan, ekonomi, hingga diplomasi yang digunakannya berdasarkan kondisi geografis yang dimilikinya.

Ryacudu melanjutkan dengan mengajukan proposal yang berisikan kegiatan lanjutan "Patroli Bersama" sebagai langkah dimana nantinya kedua negara ini memiliki pandangan mengenai keamanan damai bersama. Namun usulan ini juga menjadi sebuah upaya yang masih 50% apabila diaplikasikan karena butuh begitu banyak koordinasi antara Jendral Fan Changlong dari Tiongkok yang nantinya akan jadi pemimpin tertinggi di armada patroli pertahanan ini yang di khawatirkan akan semakin menarik Indonesia larut dalam masalah yang tak kunjung di temukan ujungnya. Terlebih lagi tindakan militer begitu rentan terhadap kesalah fahaman dan juga kekerasan yang membawa konflik ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Bahaya pencurian dan penyelundupan

Secara hukum, pencurian sendiri diartikan sebagai pengambilan hak atau properti orang lain secara tidak sah dan tanpa seizing pemiliknya. Dalam kasus ini berarti usaha pengambilan sumber daya khususnya ikan di kepulauan natuna dimana secara hukum merupakan daerah kekuasaan Indonesia sehingga menunjukkan segala sumber daya yang ada didalamnya adalah milik Indonesia. Dengan adanya konflik ini, tentu Indonesia akan merasa dirugikan karena sumber daya tersebut seharusnya dimanfaatkan dan dibudidayakan oleh Indonesia sendiri sehingga dapat memperoleh keuntungan, namun bila pencurian ini terus terjadi, Indonesia akan kekurangan sumber daya dan malah harus melakukan impor sehingga terjadi kerugian secara ekonomi.

Dilain sisi, penyelundupan adalah menyembunyikan barang tanpa tanpa diketahui oleh petugas bea cukai yang seharusnya bertugas. Hal in tentu melanggar hukum karena seharusnya setiap barang yang masuk kesebuah negara tentu harus diketahui rupa maupun jumlahnya karena negara tentunya tidak ingin ada barang illegal atau barang yang belum membayar pajak masuknya memasuki batas wilayah seenaknya. Maka dari itu dalam kasus ini, penyelundupan sangatlah berbahaya khususnya dalam bidang ekonomi karena dengan adanya penyelundupan, penjual tidak membayar pajak masuk sehingga Indonesia mengalami kerugian dalam fenomena tersebut.

Kesimpulan

Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun konflik natuna ini menjadi perbincangan yang cukup merugikan bagi Indonesia, kedua pihak masih memiliki kesadaran untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah dibangun dari tahun-tahun sebelumnya agar tidak rusak. Ini merupakan faktor utama mengapa konflik ini tidak bereskalasi menjadi lebih serius karena ketika awal mula konflik terjadi, kedua pihak berusaha dengan baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomatic. Ini juga dipengaruhi dengan faktor kepercayaan yang telah dimiliki kedua pihak sebagai partner perdagangan yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun.

Keberadaan aktor non negara yang menjadi pemicu konflik ini juga menjadi faktor mengapa konflik ini dapat diselesaikan tanpa adanya tegangan yang berarti. Hal ini berarti negara tidak mengeluarkan kebijakan apapun terkait aksi pelayan Cina tersebut sehingga kejadian tersebut murni kesalahan masyarakatnya saja sehingga tidak perlu mengikutsertakan militer masing-masing negara untuk menyelesaikannya. Tentu hal ini akan berbeda bila Cina memang mengeluarkan kebijakan resmi dan melindungi nelayannya yang berada di kepulauan Natuna tersebut.

Konflik dapat bereskalasi menjadi kekerasan karena kedua pihak merasa dirinya benar dan mungkin membutuhkan pihak ketiga untuk menghakimi. Di akhir kata, dapat dipelajari bahwa dalam setiap masalah bilateral, multilateral, maupun kawasan, penyelesaian secara diplomatik harus dapat diutamakan daripada militer. Hal ini dikarenakan dengan mediasi diplomatik yang baik, tidak ada anggaran percuma yang dikeluarkan, tidak ada jiwa yang harus dikorbankan, dan tentunya hubungan dapat menjadi lebih erat setelah konflik dapat diselesaikan.

Endnotes

¹ Conelly, 2016

² Ismail, 2017

³ Poespojoedho, 2019

⁴ Rivan Kurniawan, 2020

⁵ Lund, 2009

⁶ Poespojoedho, 2019

⁷ Kasiram, 2008

⁸ Simanjuntak, 2017

⁹ Suryadinata dan Izzuddin, 2016

¹⁰ Offshore Technology Focus, 2019

¹¹ Global Review, 2015

¹² Adhityatama & Sulistyarto, 2015

¹³ Weissmann, 2015

¹⁴ Dwi, Dimas dan Naufal, 2020

¹⁵ Ismadiyanti, Fitri 2018

¹⁶ Rizal, 2018

¹⁷ Suhana, 2020

¹⁸ Suryadinata, 2016

¹⁹ Suryadinata, 2016

²⁰ Poespojoedho, 2019

²¹ Booth, 2014

References

- Adhityatama, Shinatria., & Priyatno Sulistyarto, Hadi. 2018. BUKTI LANGSUNG INTERAKSI PERDAGANGAN DI KEPULAUAN RIAU: STUDI PADA SITUS ARKEOLOGI BAWAH AIR DI PULAU NATUNA DAN PULAU BINTAN. *Jurnal SEGARA*. 14(3): 127-135
- Booth, K., 2014. *Law, force and diplomacy at sea*, 1st ed. New York: Routledge.
- Connelly L. Aaron. (2016). "Indonesia in the South China Sea : Going it Alone" , Lowy Institute for International Policy. Pg. 3
- Deasy Simandjuntak, "Natuna and Anambas Intend to Separate from Riau Islands Province", ISEAS Commentary, 6 February 2017 <https://www.iseas.edu.sg/media/commentaries/natuna-and-anambas-intend-to-separate-from-riau-islands-province-a-commentary-by-deasy-simandjuntak/> diakses pada 27 April 2020
- Dwi Novianto, Rizal. Agung Firmansyah, Dimas., & Adi Pratama, Naufal. 2020. PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 3(1): 69-78
- Fabian Thomas, Vincent. 2020. Kekayaan Laut Natuna & Alasan Kenapa Cina Selalu Mengklaimnya. Online <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk> diakses pada 12 april 2020
- Ismadiyanti P. A. & Fitri J. A., 2018, Pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, *Jurnal ekonomi & studi pengembangan*, volume 19, nomor 1, hal. 1

- Michael S. Lund, "Conflict Prevention: Theory in Pursuit of Policy and Practice." In *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 287-321. London: SAGE Publications Ltd, 2009.
- Moh, K. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif-kuantitatif*.
- <https://www.offshore-technology.com/projects/natuna/> diakses pada 27 April 2020
- R. Thomas, 2020, bps beberkan data kontribusi china untuk ekspor-impor Indonesia. <https://ceknricek.com/a/bps-beberkan-data-kontribusi-china-untuk-ekspor-impor-indonesia/14638>. di akses pada tanggal 18 mei 2020.
- Suhana. 2020. Perdagangan Ikan Indonesia-China: Antisipasi Dampak Virus Corona. Suhana.web.id. diakses pada 29 mei 2020 jam 23.59 WIB
- Suryadinata L. 2016. Did the Natuna Incident Shake Indonesia-China Relations?. Singapore. YUSOF ISHAK INSTITUTE
- Suryadinata, L., & Izzuddin, M. (2017). The Natunas: Territorial integrity in the forefront of Indonesia–China relations. https://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=17281&type=111 diakses pada 27 April 2020
- Weissmann, M. (2015). The South China Sea: Still no war on the horizon. *Asian Survey*, 55(3), 596-617.